

Kaindea: Adaptasi Pengelolaan Hutan Masyarakat di Pulau-pulau Kecil

Kaindea: Adaptation on Community Forest Management in Small Islands

Nur Arafah^{1*}, Dudung Darusman², Didik Suharjito², dan Leti Sundawati²

¹Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Unhalu, Kendari

²Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

Abstract

The objective of this study was to explain how local community in small islands can managed forest under population pressure, market intervention, and political dynamics. This study was expected to answer how community adapted with environmental change in forest management in small islands. The result of the study showed that community in Wangi-wangi Island has a unique forest management system based on community. It's called kaindea. Management of kaindea done by sara (custom) and family and it's used custom order. Environmental changes which are population pressure, market intervention, and political dynamics has influenced kaindea management. Public response as result of environmental change was resposned by reinforcement of social organization, adjustment of local agriculture technology, family jobs description, and expansion of livelihood. The study concluded that social organization (institution and social capital) has been very important roles on forest management and sustainability. It was suggested to have a further study about how orthogonal transformation in local institution passed to formal institute, by making community based forest management regulation, especially in customary forest.

Keywords: adaptation, kaindea, forest, sustainability, small island

**Penulis untuk korespondensi, e-mail: noer_arafah@yahoo.com*

Pendahuluan

Kajian kelestarian pengelolaan hutan dan eksistensi masyarakat lokal dalam arus perubahan sosial budaya, ekonomi, ekologi, dan demografi tetap menjadi isu yang menarik di tingkat lokal, nasional, dan global (Chomitz dkk. 2007, Lynch dan Talbott 2001, Suharjito dkk. 2000). Hal ini disebabkan oleh sistem yang adaptif dalam pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat lokal (Edmunds dan Wollenberg 2003, Nath 2005, Claridge dan O'Callaghan 1995, Korten 1986) seperti kelembagaan adat (Golar 2007, Wiratno dkk. 2001), dan modal sosial (Suharjito dan Saputro 2008).

Dalam konteks ini perlu dikaji lebih jauh kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya hutan dalam merespons perubahan lingkungan pada suatu geografi yang khas seperti di pulau-pulau kecil. Sampai saat ini belum banyak dikaji mengenai sistem pengelolaan hutan adat yang dikelola secara turun temurun di pulau-pulau kecil, termasuk respons dan kemampuan masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan implikasinya pada hutan. Pengkajian dilakukan terhadap pengelolaan hutan adat (*kaindea*) yang terletak di pulau-pulau kecil di Kabupaten Wakatobi.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perubahan lingkungan terhadap *kaindea* sebagai strategi

adaptasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan di pulau-pulau kecil dan menjelaskan wujud pengaturan sistem pengelolaan *kaindea* dan implikasinya terhadap performansi *kaindea*.

Metode

Teori *cultural ecology* Steward (1955) menjadi rujukan dalam menjelaskan respons masyarakat terhadap perubahan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya hutan adat *kaindea* sebagai strategi adaptasi masyarakat pulau-pulau kecil. Adaptasi *cultural ecology* secara operasional dijabarkan melalui konsep ekologi yaitu geografi, demografi, ekonomi, dan politik serta upaya masyarakat dalam merespons perubahan dan mencari pola baru (Geertz 1983, Kuntowijoyo 2002, Fox 1996).

Penelitian ini dilakukan di Pulau Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian adalah studi kasus melalui perspektif emik. Pengambilan data dilakukan sejak November 2007-Juni 2008. Unit analisis pada bekas dua wilayah adat (*Kadie Mandati dan Wanci*) yang mempunyai hutan adat. Data terdiri atas data primer dan data sekunder. Konsep penelitian yang dipakai adalah perubahan lingkungan (tekanan penduduk, intervensi pasar, dan dinamika politik), dan konsep adaptasi pengaturan sumber daya (organisasi sosial, teknologi, pengaturan

tenaga kerja, dan ragam mata pencaharian, dan performansi *kaindea*). Analisis data dilakukan dengan analisis sejarah, hubungan sebab-akibat, dan performansi.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan lingkungan. Pulau Wangi-wangi merupakan pulau-pulau kecil¹ dan khas². Luas daratan 152,9 km² yang beriklim D (Smith dan Ferguson) sehingga bersuhu panas. Rata-rata curah hujan rendah dengan topografi landai dan berbukit antara 1-350 m dpl. Sumber air berasal dari gua-gua dan air tanah dangkal. Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian lahan kering dan selebihnya di sektor jasa perdagangan, industri, dan PNS. Jumlah penduduk tahun 2006 adalah 48.083 jiwa. Pada awalnya, masyarakat Wangi-wangi berhubungan dengan Maluku, sistem pemerintahan adat kemudian bernaung di Kesultanan Buton. Sejarah hubungan *Kadie* Mandati dan Wanci di pusat kekuasaan berbeda. Sejarah ini kemudian menentukan perkembangan masyarakat (Kuntowijoyo 2002).

Tekanan penduduk. Tekanan penduduk pulau-pulau kecil adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan yang berpotensi air tawar atau lahan subur (DKP 2007). Awalnya penduduk Wangi-wangi tinggal di Koba. Karena keterbatasan sumber air dan lahan pertanian yang subur, komunitas bergerak ke arah barat pesisir pulau untuk memudahkan kontrol dan akses terhadap sumber daya.

Pada awal abad ke-20, Schoorl (2003) menggambarkan *kadie* (desa/kampung adat) dengan kepadatan penduduk yang tinggi. *Kadie* Mandati dan Wanci termasuk daerah yang padat penduduknya di Pulau Wangi-wangi. Masing-masing *kadie* menanggapi kepadatan secara berbeda. *Kadie* Mandati mengelompok dan *Kadie* Wanci memencar. Saat itu, status *kaindea* sebagian dialihkan kepemilikan dan pengelolaan untuk dikelola keluarga.

Loncatan pertumbuhan penduduk Wangi-wangi terjadi sekitar tahun 1961 (23.073 jiwa) dengan rata-rata pertumbuhan 2,86% setiap tahun. Mengacu pada

rasio jumlah jiwa terhadap luas lahan, kepadatan penduduk Wangi-wangi pada tahun 1961 mencapai 415 jiwa/km². Angka ini jauh melebihi hasil penelitian Van Beukering untuk daerah perladangan di Indonesia, maksimum 50 jiwa/km² (Fox (1996). Adapun tekanan penduduk Wangi-wangi pada tahun 1961 mencapai 1840 jiwa/km². Jika dikaitkan dengan sistem perladangan masyarakat yang sudah melakukan intensifikasi, maka sebenarnya sebelum tahun 1961 tekanan penduduk telah terjadi di Pulau Wangi-wangi. Hasil penelitian emik masyarakat mengisahkan bahwa kurun waktu sebelum tahun 1960 merupakan masa kekurangan pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Geertz (1983) bahwa ciri-ciri tekanan penduduk adalah ketika ladang-ladang ditanami terlalu cepat (intensif), praktek pertanian yang boros, dan perluasan lahan pertanian ke arah hutan.

Saat ini kepadatan penduduk telah cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan ruang bercocok tanam semakin sempit. Akibatnya, kebutuhan pangan yang tidak mencukupi dan daerah tangkapan hujan semakin berkurang. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa hampir semua komoditas pangan telah didatangkan dari luar daerah Wangi-wangi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu-bumbuan, sedangkan komoditas beras didatangkan dari Kendari dan Sulawesi Selatan. Kuntowijoyo (2002) menjelaskan bahwa sempitnya lahan pertanian dan kurangnya makanan merupakan akibat dari tekanan penduduk yang tinggi.

Intervensi pasar. Intervensi pasar menurut Alexander (1999) dalam Ahmad (2005) menggunakan tiga konsep, yaitu dagang, pedagang, dan perdagangan. Konsep dagang menempatkan pasar sebagai arena sistem tukar menukar barang dan sirkulasi barang dagangan. Konsep pedagang menggambarkan tipe pedagang dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan mereka ke hubungan sosial yang rumit. Sedangkan perdagangan diartikan sebagai suatu aliran informasi yang terstruktur berdasarkan budaya. Masyarakat Wangi-wangi mempunyai orientasi ekonomi dari subsisten menjadi komersial, dari mata pencaharian dari pertanian lahan kering jangka pendek menjadi perdagangan dengan komoditas ekonomi jangka panjang dan barang-barang luar yang bernilai ekonomi, dari pertukaran barang dan jasa yang bersifat lokal (*barter*) menjadi aktivitas ekonomi uang dalam lingkup regional, nasional, dan bahkan internasional. Masyarakat Wangi-wangi pada awalnya hidup subsisten pada pertanian tradisional dengan lahan yang relatif terbatas. Ekologi yang tandus, miskin hara, dan permintaan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan jumlah kesempatan kerja di pertanian ladang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Hal ini mendorong masyarakat mencari alternatif pekerjaan lain di luar daerah dengan bermigrasi. Masyarakat Wanci bermigrasi ke Maluku, sementara masyarakat Mandati melakukan perdagangan antar pulau.

¹ Pulau-pulau kecil yaitu pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km². Definisi yang sama dikemukakan UNESCO (DKP 2007:8).

² Pulau-pulau kecil mempunyai karakteristik yang khas secara fisik, ekologis, dan sosial-budaya dan ekonomi. Secara fisik: terpisah dari pulau besar; membentuk satu gugus pulau; lebih banyak dipengaruhi hidro-klimat laut; rentan terhadap perubahan alam/manusia; substrat pulau tergantung pada kondisi dan proses geologi dan morfologi; kedalaman laut rata-rata antar pulau ditentukan kondisi georafis dan jarak pulau; dan dinamika oceanografi yang unik. Secara ekologis: memiliki spesies flora dan fauna yang spesifik; resiko perubahan lingkungan tinggi; daya dukung pulau spesifik; dan memiliki biodiversitas ekosistem laut yang cukup melimpah. Secara sosial-budaya dan ekonomi: ada pulau yang berpenghuni dan tidak; budaya, adat dan kebiasaan yang unik; ketergantungan ekonomi pada luar pulau; kualitas SDM terbatas; dan aksesibilitas rendah (DKP 2007:9-10).

Perkembangan sektor perekonomian migrasi ini memberikan keuntungan secara ekonomi yang lebih baik dibanding sektor pertanian (subsisten).

Terjadinya kontak dengan daerah lain yang secara ekonomi telah membawa dampak pada masyarakat Wangi-wangi. Terlibatnya masyarakat Wangi-wangi dalam arus perekonomian telah memberikan pengaruh pada masyarakat terutama pada jiwa konsumerisme, ditandai dengan munculnya barang-barang secara fisik dalam suatu keluarga, seperti mekarnya permukiman penduduk dengan rumah permanen, banyaknya kendaraan bermotor, dan alat elektronik (video, *tape*, kamera, televisi, pengatur udara). Tanaman tradisional banyak berubah menjadi komoditas ekonomi, sehingga kebutuhan sumber daya (lahan/hutan) semakin meningkat. Penyumbang kerusakan hutan di Wangi-wangi adalah ekspansi kebun ke wilayah hutan, kebutuhan bahan bangunan, dan kayu bakar. Praktek destruktif masyarakat merupakan indikator masuknya intervensi ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Wiratno dkk. 2001).

Dinamika politik. Dinamika politik berkaitan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya hutan. Masalah pengelolaan hutan di Pulau Wangi-wangi khususnya di *kadie* adalah dinamika politik pemerintah sejak zaman kesultanan dan intervensi VOC, orde lama, orde baru, dan reformasi. Intervensi VOC terhadap Buton terjadi ketika menjalankan politik dagang dan penebangan pohon rempah-rempah termasuk di Kepulauan Tukang Besi.

Tahun 1960-an pemerintahan adat beralih ke sistem distrik dan desa. Peran pemerintahan adat (kesultanan) dihapuskan, dan menyebabkan perhatian pemerintah terhadap hutan adat mengalami kemunduran. Aturan adat dalam pengelolaan sumber daya mulai diabaikan. Pembukaan hutan *lebho* tahun 1968 di Longa Wanci menjadi bukti peranan adat tidak diakomodasi oleh negara³. Pemerintah desa seharusnya melanjutkan fungsi *sara* yang mulai terabaikan seperti peralihan kewenangan *meantu'u* (kepala adat/*sara*) ke kepala desa Mandati. Pada peralihan tersebut tidak menimbulkan masalah terhadap kontrol sumber daya karena kepala desa yang diangkat masih turunan *Meantu'u* Mandati. Sebaliknya di Wanci, transisi kekuasaan kepala desa tidak ditunjuk dari turunan langsung *meantu'u*, sehingga kontrol sumber daya semakin berkurang.

Perubahan status Wakatobi menjadi kabupaten pada tahun 2003 meningkatkan kebutuhan lahan perkantoran, fasilitas umum lainnya, perumahan, dan bahan bangunan berdampak terjadinya konversi hutan

dan lahan. Kebijakan pembatasan kayu mendorong pencurian kayu.

Organisasi sosial sebagai strategi adaptasi pengelolaan *kaindea*: kelembagaan adat. Sejak awal, masyarakat Pulau Wangi-wangi sudah tertata dalam suatu pemerintahan adat. Setelah menjadi bagian dari Kesultanan Buton, struktur pemerintahan dan pengelolaan *kaindea* semakin baik. Struktur organisasi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.

Pada tahun 1960 pemerintahan adat dibubarkan dan beralih ke sistem distrik. Peran lembaga adat (*sara*) mulai bergeser dengan penunjukan kepala desa yang menggantikan *meantu'u* sebagai kepala di *kadie*. Kepala desa di Mandati tetap ditunjuk dari turunan *meantu'u* sementara di Wanci tidak dilakukan lagi.

Tahun 1997, masyarakat melihat bahwa peranan pemerintah desa menjadi pengayom *sara*, ternyata tidak bisa diharapkan berkaitan dengan kontrol sumber daya dan kondisi sosial. *Sara* masjid yang diharapkan, ternyata tidak mampu karena posisi mereka lebih banyak mengurus masalah agama. Keadaan ini mengundang reaksi sejumlah orang menggagas lembaga adat yang berfungsi menjaga agar adat dan pengelolaan sumber daya. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum agama tetap dijalankan oleh *sara* masjid. Pada perkembangannya lembaga adat ini tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Berbagai kasus tanah dan perambahan hutan tidak mampu diselesaikan. Sebagian pengurus lembaga adat menjadi pengurus partai politik dan calon legislatif sehingga masyarakat tidak percaya.

Untuk menjaga eksistensi sumber daya masyarakat Mandati mempunyai falsafah: *Bhara u pobela-bela akoe na togo* (pengelolaan sumber daya harus mengutamakan kepentingan umum), *Tepamonia u'togo* (melindungi konservasi air dan kesuburan lahan), dan *Te sowo'a u'Sara* (ketahanan pangan komunitas adat).

Sistem sosial dan kekerabatan. Sistem sosial dan kekerabatan terdapat variasi penting antara Mandati dan Wanci. Hal ini tidak lepas dari orientasi hidup masyarakat dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan termasuk pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat Mandati menyukai berdagang dan bertani, meskipun saat ini orang Mandati sudah ada yang menjadi pegawai negeri meskipun tidak sebanyak masyarakat Wanci. Sebaliknya masyarakat Wanci umumnya pegawai dan bertani/nelayan. *Kadie* Wanci mempunyai hubungan baik dengan pusat kekuasaan (Kesultanan Buton) di Wolio sedangkan Mandati kurang.

Dalam perkawinan, arti hubungan kekerabatan antara dua daerah ini terdapat beberapa perbedaan. Di Mandati, perkawinan antara sepupu satu kali (*tolida*) diperkenankan terutama pada keluarga bangsawan. Di Wanci perkawinan *tolida* dihindari dan lebih disukai

³ Pembukaan lahan hutan *motika sombu waliullah (Motika Lebho)* untuk lahan perkebunan oleh *Karyantiga* (Persatuan Veteran) tanpa konfirmasi ke Kepala Kampung Longa. Pembukaan lahan ini, banyak diikuti oleh Warga Longa dan Patuno, dengan mengatasnamakan *Karyantiga* (Asuhadi 2008).

perkawinan sepupu dua kali (*topendua*) atau tiga kali (*topentalu*). Di Mandati perkawinan memperhatikan asal-usul dan sangat menyukai yang hubungan kekerabatan lebih dekat agar harta dan pusaka tidak berpindah, juga ilmu dan status tidak luntur. Masyarakat Wanci tidak mempermasalahkan turunan dan pusaka. Untuk mempertahankan hubungan sosial (*santuha*), Mandati sangat konservatif. Untuk mengontrol perilaku sosial, dikenal dengan nama *sikola tandai* yang artinya setiap perilaku seseorang akan terekam secara sosial sampai pada anak dan keturunannya.

Sistem teknologi. *Kaindea* dan kebun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada awal abad ke-20, ketika penduduk *kadie* mulai padat. Penduduk *Kadie* Mandati yang di Wungka dan Longa Mandati minta agar sebagian lahan dan *kaindea* dapat dikelola oleh masyarakat. Setelah dibentuk *sara* masjid, maka delapan *kaindea sara* dialihkan ke keluarga. Kebun merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena sumber utama kehidupan masyarakat dan status sosial. Sementara itu, hanya terdapat *kaindea sara* di *Kadie* Wanci yang dialihkan.

Pada awalnya masyarakat sudah mengenal bercocok tanam secara tradisional dan berpindah. Kebun masyarakat hanya berbentuk ladang (*ontoala*). Awal abad ke-20 lahan semakin terbatas, masyarakat intensif mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat itu istilah kebun (*koranga*) mulai dikenal, sejalan dengan diizinkan lahan sekitar *motika* untuk dibuka masyarakat untuk berkebun. Vegetasi *kaindea* yang awalnya hanya kenari, enau, bambu, dan mangga kemudian dibiarkan banyak tumbuh berbagai vegetasi lainnya. Tahun 1960-an hubungan dengan Jawa mulai intensif, sistem pertanian mengalami kemajuan dengan sentuhan teknologi cangkul. Masyarakat mulai mengolah tanah dengan dicangkul dan dibuatkan gundukan tanah untuk menanam ubi kayu. Jenis ubi diganti dengan varietas baru sehingga umur panennya lebih singkat (6 bulan). Sistem pertanian *welli'a* beralih ke *rawu'a*.

Pengaturan tenaga kerja dan keluarga. Awalnya wanita di rumah mengurus keperluan keluarga⁴. Wanita melakukan kegiatan menenun dan membuat tembikar dari tanah liat. Perpindahan anggota keluarga terutama ayah sebagai akibat dari sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga membawa konsekuensi pada anggota keluarga yang lain. Setelah intensifikasi kebun, isteri banyak membantu suami untuk mencari kayu bakar, membawa

hasil kebun ke pasar disamping tugas pokok sebagai ibu rumah tangga.

Pada masa migrasi, peran isteri menggantikan kedudukan ayah dalam keluarga ketika suami merantau, sehingga dituntut menyediakan kebutuhan rumah tangganya dengan memanfaatkan kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak laki-laki remaja bekerja membantu ibunya di kebun dengan teman-temannya (*porabha*) dan perempuan membantu ibunya di rumah. Pekerja anak dibawah usia menjadi gejala yang sering terjadi ketika ayah belum pulang dari perantauan. Ketika dewasa, anak laki-laki akan merantau dan anak perempuan segera dinikahkan. Setelah ekonomi pasar mulai berkembang, wanita banyak beralih menjadi penjual ikan, pedagang barang-barang kelontong, barang-barang bekas, dan penjual bahan makanan kecil (jajanan). Sedangkan keperluan ekonomi diurus oleh laki-laki termasuk pertanian.

Pengembangan ragam mata pencaharian. Pengembangan ragam mata pencaharian dilakukan dengan migrasi, yaitu upaya masyarakat meninggalkan kampung halamannya untuk berlayar dan mencari kerja. Pada awal tahun 1960-an masyarakat sangat merasakan rendahnya daya dukung ekologi (lahan). Akibat tidak seimbang antara kesempatan kerja yang tersedia dan jumlah tenaga kerja sebagai akibat pertambahan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan pengangguran dan menguatnya ketergantungan pada sektor pertanian. Pada saat yang sama, sektor pertanian tidak dapat memberikan jaminan hidup yang memadai, sehingga umbi hutan pun harus dimakan karena krisis pangan. Faktor ekologi dan tekanan penduduk dan pasar direspons masyarakat untuk mencari pekerjaan lain dengan melakukan migrasi (berlayar dan mencari kerja) dalam rangka mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup. Puncak migrasi ke luar negeri (Singapura, Malaysia) terjadi dalam kurun waktu 1980-1987. Pada periode ini juga masyarakat sebagian ke Maluku menjadi pemetik cengkeh musiman atau berkebun.

Intensifitas dan jangkauan mobilitas aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa intervensi pasar (ekonomi) telah mempengaruhi masyarakat Wangi-wangi. Masyarakat sekarang banyak yang berdagang baik antar pulau maupun mengisi kios-kios di pasar lokal. Dampaknya terlihat pada perubahan struktur bangunan dan perumahan, serta sarana dan prasarana ekonomi, transportasi darat turut berkembang dimana pembangunan fisik dan sosial mempunyai perbedaan dengan sebelum tahun 1980-an. *Smeltser* yang dikutip Kuntowijoyo (2002) bahwa perkembangan dan perubahan sosial ekonomi suatu masyarakat terjadi karena akibat dari kontak dengan ekonomi di luar sektor pertanian. Perubahan itu berwujud pada perubahan perilaku, pergeseran struktur sosial, segmentasi, dan proses sosial.

⁴ Schoorl (2003) menjelaskan pada zaman awal kesultanan sampai awal abad 20, wanita Buton tidak diperkenankan keluar rumah. Ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya untuk merantau tidak bisa menerima tamu secara langsung karena dianggap akan mencelakakan suaminya. Keadaan sekarang sudah jauh berubah.

Tabel 1 Rekapitulasi karakteristik hutan *kaindea* di Pulau Wangi-wangi

| Karakteristik | | Lokasi | | | |
|----------------------------------|------------|---------|---------|-------|---------|
| | | Mandati | | Wanci | |
| | | Sara | Santuha | Sara | Santuha |
| Penguasaan tanah dan sumber daya | Individu | - | - | v | v |
| | Komunal | v | v | - | - |
| Orientasi usaha | Komersial | - | - | - | - |
| | Subsisten | v | v | v | v |
| Pola pengelolaan | Monokultur | - | - | v | v |
| | Agrohutani | v | v | - | - |

Tabel 2 Daftar *kaindea*, persebaran, luas, kepemilikan, dan performansi emik

| No | Nama <i>Kaindea</i> | Letak | Luas (ha) | | Milik | Performansi emik ⁵ |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | | Dulu | Sekarang | | |
| 1 | <i>Kaindea</i> NTo'oge | Kel. Mandati II | 5 | 5 | <i>Sara</i> Mandati | Kondisi baik dan terjaga. |
| 2 | <i>Kaindea</i> Sandumale | Desa Wungka | 1 | 1 | <i>Sara</i> Mandati | Kondisi baik dan terjaga. |
| 3 | <i>Kaindea</i> Malarau | Kel. Mandati I | 0,8 | 0,6 | <i>Santuha</i> Mandati | Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 4 | <i>Kaindea</i> Moori | Desa Wungka | 0,7 | 0,5 | <i>Santuha</i> Mandati | Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 5 | <i>Kaindea</i> Rawa | Desa Wungka | 0,5 | 0,4 | <i>Santuha</i> Mandati | Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 6 | <i>Kaindea</i> Bulu-bulu'a | Desa Wungka | 0,6 | 0,5 | <i>Santuha</i> Mandati | Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 7 | <i>Kaindea</i> Teemongkonna | Desa Wungka | 0,7 | 0,5 | <i>Santuha</i> Mandati | Agak rusak dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 8 | <i>Kaindea</i> Kansowa | Kel. Mandati II | 1 | 0,16 | <i>Santuha</i> Mandati | Rusak dan sebagian menjadi lahan kebun. |
| 9 | <i>Kaindea</i> Woru | (Batas) Liya-Mandati | 0,8 | 0,6 | <i>Santuha</i> Mandati | Agak baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. |
| 10 | <i>Kaindea</i> Balande | Desa Numana | 1,4 | 1,2 | <i>Santuha</i> Mandati | Secara umum baik dan terpelihara. Pemilik membuka kebun di pinggirnya. |
| 11 | <i>Kaindea</i> Kareke | Desa Tindoi | 3 | 1,5 | <i>Sara</i> Wanci | Rusak ringan dan sudah dibuka untuk kebun oleh warga. <i>Sara</i> tidak berfungsi lagi. |
| 12 | <i>Kaindea</i> Teo | Kelurahan Wanci | 12 | 4 | <i>Sara</i> Wanci | Rusak dan sudah dibuka untuk kebun oleh warga. <i>Sara</i> tidak berfungsi lagi. |
| 13 | <i>Kaindea</i> Posalu (Wanci) | Desa Tindoi dan Desa Posalu | 10 | 5 | <i>Sara</i> Wanci | Mulai rusak dan dibuka untuk kebun. <i>Sara</i> sudah tidak berfungsi lagi. |
| 14 | <i>Kaindea</i> Taibhete | Desa Tindoi dan Desa Posalu | 1 | - | <i>Sara</i> Wanci | Rusak, tidak ditemukan pohon, hanya ada strata bawah pohon, dan sudah didominasi kebun. <i>Sara</i> tidak berfungsi. |
| 15 | <i>Kaindea</i> Masirimu | Desa Waha | 1 | - | Individu | Rusak dan didominasi kebun. <i>Kaindea</i> ini pernah diperkarakan kepala distrik. |
| 16 | <i>Kaindea</i> Wa Pou | Desa Waha | 4 | - | Individu | Rusak, didominasi kebun, dan tidak ada yang menjaganya. |

⁵ Performansi emik didasarkan pada penutupan lahan dan keamanan kawasan *kaindea*.

Performansi *kaindea*: karakteristik *kaindea* di Pulau Wangi-wangi. *Kaindea* adalah hutan yang sengaja ditanam oleh masyarakat yang berfungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. *Kaindea* merupakan bagian integral dari kebun (*koranga*). *Kaindea* merupakan lahan yang subur dengan solum tanah yang dalam yang kawasan dikelilingi kebun masyarakat. *Kaindea* mempunyai fungsi lindung (konservasi tanah dan air), ekonomi (ketahanan pangan komunitas), sumber bahan kegiatan adat, kekerabatan, dan sebagai tempat melakukan pertemuan rahasia. Awalnya, tanaman yang ditanam adalah tanaman pohon seperti kenari, enau, mangga, dan bambu, sedangkan dari jenis tanaman pangan berupa umbi.

Awalnya semua *kaindea* merupakan lahan milik dan dikelola oleh *sara*. Pada abad ke-20, sebagian status kepemilikan dan pengelolaan diserahkan pada keluarga sebagai balas jasa atas pengabdian keluarga kepada adat.

Pada awalnya *kaindea* mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dalam penguasaan tanah dan sumber daya adalah komunal. Orientasi usaha adalah subsisten dan pola pengelolaan adalah agrohutani. Seiring waktu terjadi perubahan karakteristik pada wilayah Adat Wanci, namun tidak terjadi di Mandati. Untuk lebih jelasnya karakteristik hutan *kaindea* di Pulau Wangi-wangi dapat dilihat pada Tabel 1.

Performansi *emik*. Kinerja pengelolaan versi masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dari generasi ke generasi. *Kaindea* di Pulau Wangi-wangi mempunyai tingkat performansi berbeda menurut wilayah adat. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Kesimpulan

Perubahan lingkungan yang terjadi di Pulau Wangi-wangi berupa tekanan penduduk, intervensi ekonomi, dan dinamika politik. Perubahan lingkungan direspons dengan penguatan organisasi sosial, penyesuaian teknologi, pengaturan tenaga kerja, dan pengembangan ragam mata pencaharian.

Performansi *kaindea* berbeda-beda dan organisasi sosial menjadi respons masyarakat yang berpengaruh terhadap performansi *kaindea*. Hal ini dibuktikan pada masyarakat adat Mandati yang mempunyai organisasi sosial lebih konsisten. Falsafah pengelolaan sumber daya termasuk *kaindea* masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Organisasi sosial (institusi dan modal sosial kekerabatan) terbukti efektif sebagai sarana mengatur sumber daya hutan *kaindea* menjadi tetap lestari. Di sisi lain, ada klaim negara bahwa *kaindea* adalah hutan

lindung. Untuk mengantisipasi konflik dikemudian hari diharapkan kemauan politik agar transformasi kebijakan kelembagaan dengan berbasis masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Undang-undang yang tumpang tindih yang berkaitan dengan sumber daya perlu disinkronisasi untuk mencegah konflik kepentingan antara pusat dan daerah melalui peraturan daerah.

Kebutuhan sumber daya akan terus meningkat dan disisi lain Wangi-wangi sebagai pulau-pulau kecil di dalam kawasan konservasi sangat rentan terhadap perubahan. Dalam konteks pemerintah daerah diperlukan penetapan kawasan hutan dan perencanaan daya dukung. Dalam konteks kepentingan masyarakat lokal adalah perlu dikembangkan ragam mata pencaharian, peningkatan kapasitas, dan teknologi pertanian tepat guna. Agar lebih operasional, kebijakan tersebut perlu dibarengi perangkat insentif dan disinsentif untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam pulau dan kawasan.

Daftar Pustaka

- Asuhadi, S. 2008. Profil Hasil Praktikum CBIA di Desa Longa, Wangi-wangi. Bappeda Wakatobi.
- Chomitz, K., Giacomo, D.L., Piet, B., Timothy S.T., dan Sheila, W.K. 2007. Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan di Hutan Tropis. Salemba Empat, Jakarta. 296hlm.
- Claridge, C.F. dan O'Callaghan, B. 1995. Community Involvement in Wetland Management: Lesson from the Field. *Di dalam*: Proceedings of Workshop 3: Wetlands, Local People and Development, Kuala Lumpur, 9-13 Oktober 1995. 278hlm.
- DKP. 2007. Petunjuk Teknis Perencanaan Tata Pulau-pulau Kecil. Ditjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Edmunds, D. dan Wollenberg, E. 2003. Local Forest Management. The Impacts of Devolution Policies. Earthscan Publications, London. 208hlm.
- Fox, J.J. 1996. Panen Lontar. Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 351hlm.
- Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian. Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (terjemahan S. Supomo). Bharatara Karya Aksara, Jakarta. 178hlm.
- Golar, 2007. Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro. Kajian Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah [Disertasi]. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

- Korten, D.C. 1986. *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Kumarian Press, Philippines. 328hlm.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, 1850-1940*. Mata Bangsa, Yogyakarta. 679hlm.
- Lynch, O.J. dan Talbott, K. 2001. *Keseimbangan Tindakan. Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik* (terjemahan ND Sasanti). Elsam, Jakarta. 320hlm.
- Nath, T.K, Inoue M., dan Myant, H. 2005. *Small-scale Agroforestry for Upland Community Development: A Case Study from Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*. The Japanese Forest Society and Springer-Verlag Tokyo. (10):443-452.
- Rabani, L.O. 1997. *Migrasi dan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Tukang Besi Kabupaten Buton 1961-1987* [Skripsi]. Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Schoorl, P. 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Djambatan, Jakarta. 253hlm.
- Suharjito, D. dan Saputro, E. 2008. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(4):317-335.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W.A., Sirait, M.T., dan Evelyn, S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Kerjasama FKMM-Ford Foundation. Adityamedia, Yogyakarta.
- Steward, J.H. 1955. *Theory of Culture Change*. University Illionis Press, Urbana. 256hlm.
- Wiratno, Daru, I., Syarifudin, dan Ani, K. 2001. *Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Forest Press, Boyolali. 330hlm.